

PENGARUH KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH BELANJA MODAL DAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Eny Wahyuni

Enywahyunii95@gmail.com

Lilis Ardini

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of local revenue performance, capital expenditure, and personnel expenditure on the level of regional financial independence at the Regency / City in East Java Province. The population in this research was obtained by using Purposive Sampling method in Regency / City in East Java Province and based on predetermined criteria, the sample of 38 regencies / cities in East Java Province was obtained. The analysis method that been used is multiple linear regression analysis with using SPSS (Statistical Product and Service Solution) application tool. The results showed that the performance of local revenue had a positive influence on the level of regional financial independence, meaning that if the performance of local revenue is high then financial independence will also be high. Capital expenditures have no influence on the level of regional financial independence, meaning the allocation of improper capital spending targets and decreased quality of public services hence the regional financial independence decreased. Employee expenditures negatively influenced the level of regional financial independence, meaning that if the low employee spending will burden the financial stability of the region and financial independence to decline.

Keywords: Local own revenue performance, capital expenditure, employee expenditure, local financial independence level.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja pendapatan asli daerah, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Populasi dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh sampel sebanyak 38 kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, artinya jika kinerja pendapatan asli daerah tinggi maka kemandirian keuangan juga akan tinggi. Belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, artinya alokasi belanja modal yang tidak tepat sasaran dan penurunan kualitas layanan publik maka kemandirian keuangan daerah menurun. Belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, artinya jika belanja pegawai meningkat maka akan membebani stabilitas keuangan daerah dan kemandirian keuangan menjadi menurun.

Kata Kunci: Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

PENDAHULUAN

Era reformasi saat ini membawa perubahan terhadap sosial, kemasyarakatan, politik, dan ekonomi yang menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda yaitu dengan adanya otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan. Otonomi daerah yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri yang berdasarkan aspirasi masyarakat dengan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya berfokus pada dana bantuan dari pusat yang dalam bentuk dana perimbangan.

Melainkan Lebih penting dari itu daerah dapat mandiri untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk kemandirian keuangan daerah dengan memanfaatkan, dan mengelola potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Otonomi daerah ini ditandai dengan adanya penyerahan kewenangan daerah yang diikuti dengan penyerahan sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Prinsip dasar pemberian otonomi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa hanya daerah yang lebih mengetahui semua kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Pemberian kewenangan otonomi menuntut daerah agar dalam melaksanakan pembangunan dari segala bidang untuk pembangunan sarana dan prasarana publik. Yang diharapkan untuk dilaksanakan secara mandiri oleh daerah dari sisi perencanaan pembangunan dan pembiayaannya.

Adanya otonomi daerah, setiap daerah harus memenuhi kebutuhan daerahnya masing - masing tanpa bergantung dengan dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim dan Kusufi, 2012). Menurut Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD yang dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari dari sumber lainya yaitu bantuan dari Pemerintah Pusat atau dari pinjaman. Semakin besar PAD yang didapat oleh Pemerintah Daerah daripada bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagai daerah yang mandiri.

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Jika rasio kemandirian semakin tinggi, maka tinggi pula partisipasi masyarakat dalam hal membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dari PAD. Semakin tinggi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah maka akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Fenomena umum yang terjadi diindonesia saat ini relatif kecilnya peranan PAD dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, peranan dalam penerimaan yang berasal dari Pemerintahan Pusat lebih mendominasi dari susunan APBD. Oleh karena itu, masing - masing daerah diharapkan lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengali sumber daya yang dimiliki oleh daerah masing -masing. Maka daerah tersebut akan mampu dalam melaksanakan segala urusan pemerintahnya sendiri dengan alasan sumber pembiayaan sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Apabila terwujud, maka cita - cita kemandirian daerah dapat terealisasi. PAD ini merupakan sumber pembiayaan yang memang benar digali dari daerah itu sendiri yang dapat mencerminkan kondisi dari suatu daerah dari pemerintah daerah yang mampu mengenali sumber daya yang dimiliki untuk dapat meningkatkan PAD.

Kinerja PAD diperbandingkan antara realisasi penerimaan PAD dengan PAD yang dianggarkan. Apabila realisasi penerimaan PAD lebih besar daripada PAD yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah maka dikatakan kinerja PAD dari suatu daerah semakin efektif. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah yang berupa PAD sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi

ekonomi yang menjadi bentuk kegiatan ekonomi dalam menciptakan perguliran dana untuk hal pembangunan daerah yang berkelanjutan. PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator dalam mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Semakin besar PAD yang diperoleh maka akan mengurangi ketergantungan suatu daerah terhadap Pemerintah Pusat dan selain itu kemandirian keuangan daerah dapat disebabkan salah satunya Belanja Modal.

Dengan kemandirian daerah, diberi wewenang untuk menggali sumber keuangan yang ada di daerahnya masing - masing sehingga mampu untuk membiayai sendiri belanja daerahnya yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Jika belanja modal naik maka kemandirian keuangan daerah akan naik karena belanja modal lebih besar dibiayai oleh pendapatan asli daerah maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri. Data Kemendagri anggaran untuk belanja pegawai dalam bentuk gaji pegawai dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih besar. Apabila belanja modal semakin rendah maka peluang pembangunan dan perbaikan fasilitas umum daerah akan semakin kecil. Masyarakat yang mengharapkan anggaran untuk perbaikan fasilitas umum seperti jalan, irigasi, jaringan dan belanja yang merupakan komponen dari belanja modal.

Belanja pegawai adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai Pemerintah Pusat, Pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di dalam negeri maupun diluar negeri. Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian pembangunan daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata. Upaya dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Hal ini tidak terlepas dari peran serta para pegawai pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang banyak berkaitan dengan birokrasi pemerintah daerah yang berhubungan dengan pelayan publik. Jika belanja modal naik maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan naik karena belanja modal bertujuan untuk memberikan pemasukan atau pendapatan bagi daerah sehingga pendapatan asli daerah semakin bertambah dan menjadi semakin maju.

Penelitian mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah banyak dilakukan, dimana menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan Ainy (2013) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Pada Kota di Jawa Barat. Penelitian yang dilakukan Noalista (2016) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Pada Kota di Jawa Timur. Penelitian yang dilakukan Mariza (2011) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Pada Kota di Sumatera Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Mariza (2011) diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2016) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Selain dengan penelitian antara hubungan kinerja pendapatan asli daerah dengan tingkat kemandirian keuangan daerah yang dinilai dengan rasio efektifitas pendapatan asli daerah, maka ada juga penelitian mengenai hubungan antara belanja modal dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Beberapa penelitian diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ernawati menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Pada Kota di Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikasari (2015) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Pada Kota DIY. Namun kedua hasil penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2016) dan Ikasari (2015) tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Darwis (2015) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Selain dengan penelitian antara hubungan belanja modal dengan tingkat kemandirian keuangan daerah, maka ada juga penelitian mengenai hubungan antara belanja pegawai dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Darwis (2015) menunjukkan bahwa belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota DIY.

Dengan adanya hasil penelitian yang berbeda dari berbagai wilayah maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang sejenis tentang pengaruh kinerja pendapatan asli daerah belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan sampel dari Wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya hasil penelitian yang berbeda - beda di berbagai wilayah inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang sejenis tentang pengaruh kinerja pendapatan asli daerah belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan mengambil sampel dari wilayah kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, (2) apakah belanja modal berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, (3) apakah belanja pegawai berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris: (1) pengaruh kinerja pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, (2) pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, (3) pengaruh belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

TINJAUAN TEORETIS

Stewardship Theory

Dasar Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Stewardship Theory*. *Stewardship Theory* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donalson, 1997). *Stewardship Theory* Dalam manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *Steward* dan pemilik tidak sama, *Steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya. Karena *Steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *Steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Stewardship Theory mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *Stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti *Steward* tidak mempunyai kebutuhan hidup.

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu tujuan dalam otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah yang sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah. Penerimaan Pendapatan asli daerah pada era otonomi daerah

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan era sebelumnya (Mahmudi, 2010: 18).

Keuangan Daerah

Menurut Yani (2009: 347) keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah yang terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung misalnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang – barang investaris milik daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan misalnya Badan usaha milik Daerah.

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara. Keuangan daerah berperan penting dalam otonomi daerah karena dari keuangan daerah menggambarkan cerminan kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran (Halim dan Kusufi, 2012: 33). Kemandirian dalam APBD terkait dengan kemandirian pendapatan asli daerah, sebab semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah, bukan dari bantuan, maka daerah semakin leluasa mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan Pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2002) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain- lain Pendapatan asli daerah. Tinggi rendahnya PAD suatu daerah menggambarkan kemandirian keuangan daerah otonom sehingga tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah akan bantuan dana dari Pemerintah Pusat semakin rendah. Penerimaan PAD digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah untuk mendukung penyediaan prasarana dan sarana daerah. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 33 tahun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah menyatakan pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, yang memiliki tujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

PAD merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, mengingat pendapatan asli daerah sangat mendukung terwujudnya pelaksanaan otonomi yang utuh, nyata dan bertanggung jawab di daerah kota, serta dapat berperan penting dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah untuk tidak selalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 atau lebih dari 100 %. Dengan demikian semakin besar rasio efektifitas maka kinerja pemerintahan pun semakin baik.

Tabel 1
Kriteria Penilaian rasio Efektivitas

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektifitas (%)
Sangat efektif	>100
Efektif	100
Cukup efektif	90-99
Kurang efektif	75-89
Tidak efektif	<75

Sumber : Mahmudi, 2010 (dalam Kartika dan Kusuma, 2015)

Belanja Modal

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode. Belanja Modal termasuk: (1)Belanja tanah, (2) Belanja peralatan dan mesin, (3) Belanja modal gedung dan bangunan (4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, (4) Belanja aset tetap lainnya, (5) Belanja aset lainnya.

Belanja Pegawai

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja Anggaran kementerian Negara/lembaga Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Termasuk dalam kelompok belanja pegawai ini adalah pengeluaran untuk gaji dan tunjangan, uang makan, lembur, honorarium.

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007: 232) kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah. Yang dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya bantuan pemerintah pusat maupun dari pinjaman. Tingkat Kemandirian keuangan Daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Tabel 2
Pola hubungan tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah

Kemampuan	Rasio	Pola
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber : Mahsun, 2006 (dalam Darwis, 2015)

Adapun pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:

(1) Apabila Rasio kemandirian 0-25, berarti kemampuan daerah tersebut rendah sekali. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah rendah sekali sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat (pola hubungan instruktif), (2) Apabila hasil rasio kemandirian 25-50, berarti kemampuan daerah tersebut rendah. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah rendah dalam hal keuangan sudah mulai berkurang campur tangan dari Pemerintah sehingga daerah tersebut dianggap sedikit lebih mampu untuk melaksanakan otonomi daerah (pola hubungan Konsultatif), (3) Apabila hasil rasio kemandirian 50-75 berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah sedang dianggap mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah (pola hubungan partisipatif), (4) Apabila hasil rasio kemandirian 75-100 berarti kemampuan keuangan daerah tersebut tinggi. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah agar dapat mengoptimalkan kemampuan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki serta memaksimalkan pendapatan asli daerah agar tidak bergantung terhadap dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sumber dari pendapatan asli daerah adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah. Oleh sebab itu, Kinerja Pendapatan asli daerah sangat penting untuk ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah. Semakin efektif pendapatan asli daerah maka daerah tersebut semakin mandiri.

Dalam penelitian yang dilakukan Mariza (2011) menunjukkan bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Pada kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Penelitian Ainy (2013) menunjukkan bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Pada Kota di Jawa Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2016) menunjukkan bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Noalista (2016) menunjukkan bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Pada Kota di Jawa Timur. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Khanza (2017) yang menunjukkan bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kinerja pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Daerah yang ditunjang dengan sarana prasana yang memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakat dan menarik investor dalam menanamkan modal pada suatu daerah dan akan menambah pendapatan asli daerah. Dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh Pemerintah.

Dalam penelitian yang dilakukan Darwis (2015) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/Kota Sumatera Barat. Namun dalam penelitian Ikasari (2015) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota DIY. Penelitian Ariani (2016) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Ernawati (2016) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Jawa Timur.

Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Gaji dan tunjangan merupakan pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah yang berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan. Belanja pegawai termasuk didalam belanja operasi dan merupakan salah satu komponen belanja pemerintahan.

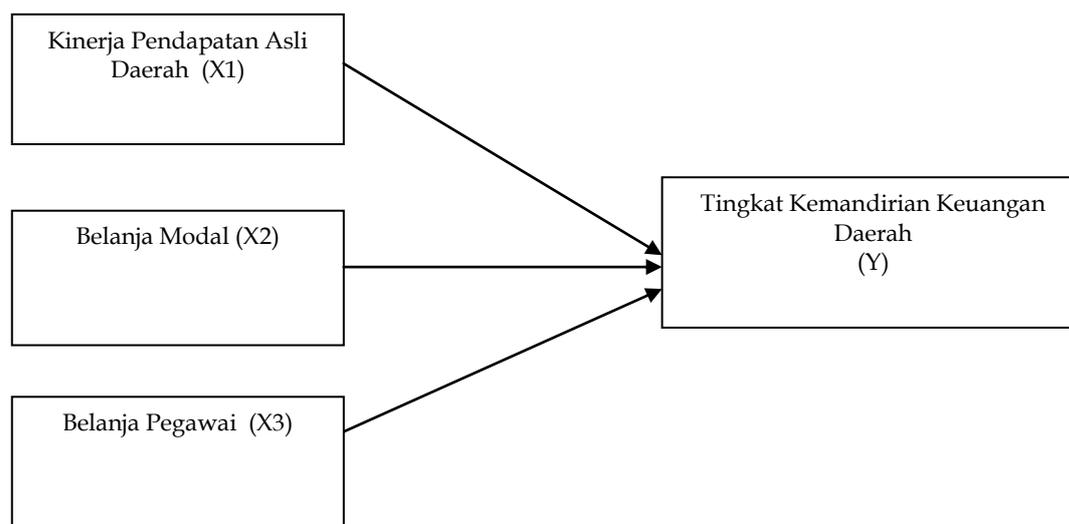
Dalam penelitian yang dilakukan Pratiwi (2016) belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Darwis (2015) menunjukkan bahwa belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap Tingkat kemandirian keuangan daerah

Model Penelitian

Model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat dikalsifikasikan, konkrit, teramati dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat diman data penelitian berupa angka - angka dan analisisnya menggunakan statistik (Sugiyono, 2008). Populasi (objek) dalam penelitian ini adalah Pemerintah kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan teknik penetapan

sampel dengan yang dikehendaki peneliti sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya (Nursalam, 2003)

Pertimbangan dalam menentukan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu : (1) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Selama 4 tahun pada periode 2013 Sampai 2016, (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dengan menyajikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama 4 Tahun 2013 Sampai 2016.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan melakukan pengumpulan data melalui buku - buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa kinerja pendapatan asli daerah, belanja modal, belanja pegawai, dan tingkat kemandirian keuangan daerah yang diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Jawa Timur tahun anggaran 2013 Sampai 2016.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan Dalam penelitian ini adalah variabel dibedakan menjadi dua bagian yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen terdiri dari Kinerja pendapatan asli daerah, belanja modal dan belanja pegawai. Sedangkan variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemandirian keuangan daerah.

Variabel Dependen

Variabel dependen (Variabel Terikat) adalah variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel bebas. Variabel output, konsekuen, variabel tergantung, kriteria variabel terpengaruh dan variabel efek. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah ini merupakan kemampuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk membiayai sendiri kegiatannya dengan menggali sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Menurut Halim (2007: 232) tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah :

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan pemerintah pusat/provinsi}} \times 100\%$$

Variabel Independen

Variabel Independen (Variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel terikat. Dapat dikatakan variabel bebas karena dapat variabel lainnya. Dalam penelitian ini ada tiga variabel independen antara lain :

Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kinerja pendapatan asli daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan asli daerah yang dianggarkan. Sehingga kinerja pendapatan asli daerah dapat dilihat dengan menggunakan rasio efektifitas. Dalam rasio efektifitas tersebut adalah ukuran dalam menilai kinerja pendapatan asli daerah. Menurut Halim dan Kusufi (2012: 53) rasio efektifitas pendapatan asli daerah yaitu :

$$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Belanja Modal

Belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaat tersendiri pada periode tertentu. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal yang merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Dengan berkembang pesatnya pembangunan yang bersumber dari alokasi belanja modal yang diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Menurut Simatupang (2016: 32) belanja modal dapat diukur dengan menggunakan rasio belanja modal yaitu :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan. Belanja pegawai berarti uang yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji rutin pegawai. Menurut DJPK pengukuran belanja pegawai adalah:

$$\text{Rasio Belanja pegawai} = \frac{\text{Belanja pegawai}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode analisis statistik. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alasan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki lebih dari satu variabel dan merupakan analisis yang mengenai dari beberapa variabel independen dengan variabel Dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

hasil dari SPSS tentang statistik deskriptif yang meliputi minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi variabel penelitian disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	152	85,0	147,8	111,866	10,7951
BM	152	1,4	445,2	29,004	55,8886
BP	152	1,0	75,5	47,747	12,5172
TKKD	152	6,5	66,7	17,128	10,2170
Valid N (listwise)	152				

Sumber: Data Sekunder diolah

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pada Pengujian normalitas menggunakan grafik *normal probability plot* dan uji *kolmogorov smirnov* yang dapat diketahui bahwa data yang digunakan oleh peneliti tidak berdistribusi normal. Untuk mendapatkan normalitas data maka penelitian ini peneliti melakukan

screening terhadap data yang dilakukan untuk mendeteksi data outlier. Setelah dilakukan outlier grafik normal probability plot yang menunjukkan adanya penyebaran titik - titik yang mengikuti arah garis diagonal dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada uji kolmogorov smirnov sebesar 0,200 > 0,05 sehingga memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas di dalam model regresi dilakukan dengan cara (Ghozali, 2009) Menganalisa matrik korelasi variabel - variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90) maka terdapat indikasi multikolinearitas. Melihat hasil uji dari nilai tolerance dan variance inflation (VIF). Multikolinearitas terjadi jika nilai tolerance kurang dari 0,10 dan jika VIF memiliki nilai lebih dari 10. Berdasarkan dari hasil uji multikolinearitas diketahui bahwa nilai variabel kinerja pendapatan asli daerah, belanja modal dan belanja pegawai memiliki nilai tolerance dan VIF yaitu 0,990, 0,827, 0,824 dan 1,010, 1,209, 1,214 dimana nilai tolerance dan VIF tidak lebih dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, nilai Durbin-Watson yang dihasilkan sebesar 1,641. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi di dalam model regresi dengan menggunakan ketentuan apabila angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas memiliki tujuan dalam menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya Bertujuan untuk mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas dalam menggunakan metode grafik yang dilakukan dengan cara mengamati scatterplot. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik tidak menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. terlihat titik menyebar secara rata dan tidak membentuk pola serta titik - titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 yang terdapat pada sumbu Y. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Data yang diolah dengan menggunakan SPSS dapat diperoleh hasil analisis regresi linier berganda yang disajikan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	28,002	5,822		4,809	,000
	PAD	,111	,037	,238	3,021	,003
	BM	-,120	,132	-,078	-,904	,368
	BP	-,178	,084	-,183	-2,117	,036

Dependent Variable: TKKD

Sumber: Data sekunder diolah

Dari output SPSS pada tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut: $Y = 28,002 + 0,111 KPAD - 0,120 BM - 0,178 BP + e$

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Uji kelayakan model atau disebut dengan *Goodness of fit* digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual yang dapat dijelaskan dengan menggunakan *analysis of variance* (ANOVA) dengan signifikansi 5% atau 0,05. Maka hasil dari uji kelayakan model regresi dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit*)

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1532,832	3	510,944	4,881	,003 ^b
	Residual	15493,443	148	104,685		
	Total	17026,276	151			

a. Dependent Variable: TKKD

b. Predictors: (Constant), BP, PAD, BM

Sumber: Data sekunder diolah

Diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 4,881 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan nilai signifikansi < 0,05, maka model persamaan regresi dalam penelitian layak dan dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh kinerja pendapatan asli daerah, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Penelitian ini menggunakan pengukuran dengan *Adjusted R Square* karena nilai *Adjusted R Square* dapat naik dan turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Berikut adalah hasil dari pengukuran koefisien determinasi yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,525 ^a	,276	,250	4,561

Predictors: (Constant), BP, PAD, BM

Dependent Variable: TKKD

Sumber: Data sekunder diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 25,0% perubahan dalam tingkat kemandirian keuangan daerah dijelaskan oleh variabel Independen .

Uji Parsial (Uji t)

Dari hasil olahan data menggunakan SPSS sebagai berikut

Tabel 5
Hasil uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	28,002	5,822		4,809	,000
	PAD	,111	,037	,238	3,021	,003
	BM	-,120	,132	-,078	-,904	,368
	BP	-,178	,084	-,183	-2,117	,036

Dependent Variable: TKKD

Sumber: Data sekunder diolah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung variabel pendapatan asli daerah sebesar 3,021 variabel Belanja modal -0,904 dan variabel Belanja pegawai -2,117. Pada tabel *coeffisien* nilai signifikansi dari tiga variabel diatas memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ dua variabel dan satu variabel memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dan belanja pegawai memiliki berpengaruh signifikansi terhadap Tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan Belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikansi terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil dari olah data statistik dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan nilai t hitung 3,021 yaitu dengan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$ dan juga dapat dilihat nilai β sebesar 0,111 dengan arah positif. Hal ini berarti pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian H1 diterima. Yang artinya bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan upaya peningkatan dalam hal pembangunan daerah untuk dapat digunakan oleh masyarakat, sehingga nantinya akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah tersebut.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariza (2011) dan Ernawati (2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar realisasi pendapatan asli daerah dan anggaran pendapatan asli daerah yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur maka akan menjadi semakin mandiri. Yang merupakan salah satu sumber dari pembiayaan daerah jika pendapatan asli daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh daerah tersebut akan meningkat juga.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil dari olah data statistik dapat dilihat bahwa Belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan nilai t hitung -0,904 yaitu dengan nilai signifikansi $0,368 > 0,05$ dan juga dapat dilihat nilai β sebesar -0,120 dengan arah positif. Hal ini berarti Belanja modal memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian H2 ditolak. Bahwa terjadinya penurunan pemerintah daerah dalam investasi modal (Belanja Modal) yang menyebabkan penurunan kualitas layanan publik sehingga menjadikan penurunan kemandirian keuangan daerah dan alokasi anggaran belanja modal yang tidak tepat sasaran sebagai penyebab daerah kurang produktif dalam penyaluran dana yang dikeluarkan tidak menambah kekayaan tetapi justru menjadikan beban.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfarista (2015) serta Suryanto (2016) bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan dana yang dikeluarkan tidak menambah kekayaan tetapi justru menjadi beban DAU.

Pengaruh Belanja pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil dari olah data statistik dapat dilihat bahwa Belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan nilai t hitung -2,117 yaitu dengan nilai signifikansi $0,036 < 0,05$ dan juga dapat dilihat nilai β sebesar -0,178 dengan arah negatif. Hal ini berarti Belanja Pegawai memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian H3 diterima. Bahwa Jumlah Belanja pegawai terjadi peningkatan sehingga menyebabkan penurunan terhadap kemandirian keuangan daerah dan akan membebani stabilitas keuangan daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Saprudin (2011) dan Darwis (2015) yang menyatakan bahwa belanja pegawai secara statistik signifikan mempengaruhi kemandirian pembangunan daerah kab Indramayu dan memiliki arah koefisien yang negatif. Hal ini disebabkan karena alokasi belanja dalam struktur APBD Kab/Kota cenderung lebih banyak dialokasikan untuk belanja rutin sehingga mengurangi kemandirian keuangan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan pengaruh kinerja pendapatan asli daerah, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada tahun 2013 Sampai 2016 maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan upaya peningkatan dalam hal pembangunan daerah untuk dapat digunakan oleh masyarakat, sehingga nantinya akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah tersebut, (2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Bahwa terjadinya penurunan pemerintah daerah dalam investasi modal yang menyebabkan penurunan kualitas layanan publik sehingga menjadikan penurunan kemandirian keuangan daerah dan alokasi anggaran belanja modal yang tidak tepat sasaran sebagai penyebab daerah kurang produktif dalam penyaluran dana yang dikeluarkan tidak menambah kekayaan tetapi menjadikan beban DAU. Untuk itu Pemerintah daerah diharapkan tidak bergantung pada pemerintah pusat dengan cara memaksimalkan sumber - sumber pendapatan, (3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pegawai memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti dikarenakan jumlah belanja pegawai terjadi kenaikan dan menyebabkan penurunan terhadap kemandirian keuangan daerah serta akan membebani stabilitas keuangan daerah di provinsi Jawa Timur maka mengakibatkan pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan di Provinsi Jawa Timur.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan diatas, beberapa saran yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan menggali potensi dari sumber daya yang dimiliki oleh setiap masing - masing daerah agar mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah yang dialokasikan untuk kepentingan publik melalui belanja modal dan belanja pegawai. Dengan demikian, pemerintah daerah mampu melakukan segala urusannya agar tidak selalu bergantung pada bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, (2) peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel dalam penelitian yang belum dicantumkan seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi umum, dan Dana Bagi Hasil yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, (3) peneliti selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian yang tidak terbatas hanya pada Provinsi Jawa Timur, sehingga hasil penelitiannya akan lebih mudah disimpulkan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainy. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi* 5(9): 38-60.
- Alfarista. 2015. Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Artikel*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

- Ariani, K.R. 2016. Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Prosiding Seminar Nasional dan The 3rd Call For Syariah paper. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Darwis, E.T.R. 2015. Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi* 3(1): 1-23.
- Donalson. 1997. Toward a stewardship theory of Management. *Academy of management Review* 22 (1): 22- 47.
- Ernawati. 2016. Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan program IBM SPSS 23*. Edisi Delapan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. dan M.S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Ikasari. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014). *Artikel*. Universitas PGRI. Yogyakarta.
- Kartika, D. dan I.C. Kusuma. 2015. Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas pendapatan asli daerah dan Rasio Efisiensi pendapatan Asli Daerah pada laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja daerah (APBD). *Jurnal Akuntansi* 1 (2): 23-33.
- Khanza. 2017. Pengaruh Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum, dan Dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan Dampaknya terhadap alokasi belanja modal. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mariza. 2011. Pengaruh PAD, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan. *Jurnal Akuntansi* 1(2): 36-59.
- Noalista. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta.
- Nursalam. 2003. *Konsep dan keperawatan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Keperawatan*. Salemba Medika. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010. Nomor 123. Jakarta.
- Pratiwi. 2016. Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Skripsi*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Saprudin. 2011. Analisis Pengaruh Upaya pajak (Tax Effort), Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Pegawai terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah di Kabupaten Indramayu Periode 1998-2008. *Skripsi*. FE Unpas. Bandung.
- Simatupang, F.F. 2016. Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sugiyono, 2008. *Statistika Untuk Penelitian*. Cetakan ke 28. Alfabeta. Bandung.
- Suryanto. 2016. Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.

Yani. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.